

**PERAN INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS (ICRC)  
DALAM MENINGKATKAN PERLINDUNGAN KEMANUSIAAN  
PADA KONFLIK ROHINGYA DI MYANMAR**

**Oleh: Indyra Auliya Neirata**

**Pembimbing: Indra Pahlawan, S.I.P., M.Si**

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

**ABSTRAK**

Krisis kemanusiaan Rohingya di Rakhine, Myanmar, merupakan akibat dari diskriminasi struktural, kekerasan militer, serta pengusiran massal yang berlangsung bertahun-tahun. Dalam situasi di mana negara gagal memberikan perlindungan dasar bagi warganya, *International Committee of the Red Cross (ICRC)* muncul sebagai aktor non-negara yang memainkan peran penting dalam upaya perlindungan dan pemenuhan kebutuhan mendesak bagi kelompok rentan tersebut. Melalui perspektif pluralisme dan teori *Humanitarian Diplomacy*, penelitian ini menelaah bagaimana ICRC menjalankan mandat kemanusiaannya melalui negosiasi, netralitas, dan keterlibatan langsung di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ICRC berkontribusi melalui beragam program di bawah kerangka *Protection and Assistance Programs*, termasuk *Water and Habitat, Emergency Relief, Health Assistance*, perlindungan sipil, hingga kunjungan ke tempat penahanan. Meskipun menghadapi hambatan berupa pembatasan akses dan situasi keamanan yang tidak stabil, ICRC tetap konsisten menjalankan prinsip kemanusiaannya. Walau tidak menyelesaikan akar konflik, upaya ICRC terbukti mampu memperkecil dampak kemanusiaan dan meningkatkan akses terhadap hak dasar bagi etnis Rohingya yang masih bertahan di Myanmar.

**Kata kunci:** ICRC, *humanitarian diplomacy*, konflik Myanmar.

**ABSTRACT**

*The humanitarian crisis in Rakhine State, Myanmar, stems from long-standing structural discrimination, military violence, and mass displacement of the Rohingya ethnic group. In the absence of adequate state protection, the International Committee of the Red Cross (ICRC) emerges as a key non-state actor providing essential humanitarian assistance and protection. Using pluralist perspectives and Humanitarian Diplomacy Theory, this study examines how the ICRC fulfills its mandate through negotiation, neutrality, and direct engagement in conflict-affected areas.*

*The findings demonstrate that the ICRC contributes through various programs under the Protection and Assistance Programs, including Water and Habitat, Emergency Relief, Health Assistance, civilian protection, and detention visits. Despite restricted access and unstable security conditions, the ICRC consistently upholds its humanitarian principles. Although it does not resolve the root causes of the conflict, the organization effectively mitigates humanitarian suffering and improves access to basic rights for the remaining Rohingya population in Myanmar.*

**Keywords:** ICRC, humanitarian diplomacy, Myanmar conflict.

## PENDAHULUAN

Krisis Rohingya di Myanmar merupakan salah satu pelanggaran kemanusiaan paling serius di Asia Tenggara abad ke-21. Status stateless akibat *Burma Citizenship Law* 1982 membuat Rohingya tereksklusi dari hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan kebebasan bergerak. Gelombang kekerasan besar pada tahun 2017, yang dipicu serangan ARSA dan respon militer yang brutal, mengakibatkan lebih dari 700.000 Rohingya melarikan diri ke Bangladesh, sementara ratusan ribu lainnya tetap hidup dalam pembatasan ekstrem di Rakhine State.<sup>1</sup>

Dalam situasi tersebut, *International Committee of the Red Cross* (ICRC) menjadi aktor kemanusiaan kunci yang memperoleh akses ke Rakhine sejak 1994 melalui diplomasi kemanusiaan yang menekankan netralitas dan kerahasiaan. Dengan mandat Konvensi Jenewa 1949, ICRC menjalankan berbagai program perlindungan dan bantuan, meliputi distribusi pangan, layanan kesehatan, penyediaan air bersih, serta advokasi penerapan Hukum Humaniter Internasional (HHI) kepada aparat

Myanmar.<sup>2</sup> Upaya ini berlangsung di tengah pembatasan akses yang dikenakan militer, terutama setelah kudeta 2021.

Meskipun kerangka normatif internasional seperti UDHR dan HHI mewajibkan perlindungan terhadap semua warga sipil tanpa diskriminasi, implementasinya di Myanmar menunjukkan kesenjangan besar antara das sollen dan das sein. Penelitian ini menganalisis bagaimana ICRC mengoptimalkan mandatnya melalui diplomasi kemanusiaan untuk menjembatani kesenjangan tersebut, khususnya dalam meningkatkan akses bantuan dan perlindungan bagi Rohingya di Rakhine.<sup>3</sup>

## KERANGKA DASAR TEORI

### Perspektif Pluralisme

Pluralisme dalam hubungan internasional menegaskan bahwa dinamika global tidak hanya ditentukan oleh negara, tetapi juga oleh aktor non-negara seperti organisasi internasional, LSM, dan individu.<sup>4</sup> Pendekatan ini mengkritik

<sup>1</sup> Crouch, M. (2016). Citizenship and Myanmar's Rohingya: The Politics of Name and Recognition. *Journal of Contemporary Southeast Asia*, 38(1), 114-139.

<sup>2</sup> International Committee of the Red Cross, *Humanitarian Response in Myanmar: Annual Report 2024*, Geneva: ICRC, 2024

<sup>3</sup> Amnesty International, *Caged Without a Roof: Apartheid in Myanmar's Rakhine State*, 2017, 14.

<sup>4</sup> Paul Viotti dan Mark Kauppi, *International Relations Theory*, (New York: Longman, 2012), 115.

realisme yang terlalu fokus pada negara sebagai pusat kekuasaan. Dalam konteks krisis Rohingya, pluralisme membantu menjelaskan bagaimana aktor non-negara seperti *International Committee of the Red Cross* (ICRC) dapat memainkan peran signifikan meskipun beroperasi tanpa kekuasaan koersif.

Pluralisme menekankan pentingnya norma, institusi internasional, dan jaringan kerja sama dalam menciptakan solusi atas isu-isu kemanusiaan.<sup>5</sup> ICRC, yang bekerja berdasarkan mandat Konvensi Jenewa, tidak hanya memberikan bantuan material, tetapi juga berperan sebagai mediator netral yang mendorong penghormatan terhadap hukum humaniter internasional. Melalui koordinasi dengan pemerintah Myanmar, NGO lokal, dan komunitas internasional, pluralisme memperlihatkan bahwa penyelesaian krisis tidak bisa hanya mengandalkan negara.

Dalam penelitian ini, perspektif pluralisme digunakan untuk memahami bagaimana peran independen ICRC dapat memengaruhi dinamika lokal dan global. Meskipun bukan aktor negara, ICRC mampu menggalang dukungan internasional, membuka akses kemanusiaan, dan merespons kebutuhan korban secara langsung.<sup>6</sup> Dengan demikian, pluralisme memberikan kerangka analitis yang relevan untuk melihat kontribusi dan tantangan ICRC dalam penanganan krisis Rohingya.

### **Teori Humanitarian Diplomacy**

*Humanitarian diplomacy* merupakan konsep yang mengkaji upaya diplomatik yang dilakukan aktor kemanusiaan untuk

melindungi kelompok rentan dan memperluas akses bantuan.<sup>7</sup> Konsep ini muncul seiring meningkatnya krisis kemanusiaan global dan peran aktor non-negara dalam penyelesaian konflik. Bagi ICRC, *humanitarian diplomacy* menjadi instrumen penting dalam bernegosiasi dengan pemerintah Myanmar guna memastikan perlindungan bagi etnis Rohingya.

*Humanitarian diplomacy* mencakup diplomasi publik dan privat, berinteraksi dengan pemerintah, militer, masyarakat lokal, maupun organisasi internasional lain.<sup>8</sup> Prinsipnya menekankan neutralitas, ketidakberpihakan, dan independensi agar organisasi kemanusiaan dapat diterima oleh seluruh pihak. ICRC menggunakan diplomasi ini untuk membuka akses ke daerah-daerah yang dibatasi militer serta memastikan distribusi bantuan berjalan aman.

Tujuan utama *humanitarian diplomacy* adalah menciptakan kondisi yang memungkinkan pelaksanaan bantuan kemanusiaan secara efektif.<sup>9</sup> Dengan merujuk pada prinsip kemanusiaan, neutralitas, dan ketidakberpihakan yang dirumuskan oleh *World Food Programme*, ICRC berperan menjaga martabat manusia di tengah konflik etnis dan kekerasan struktural di Myanmar. Melalui diplomasi ini, ICRC membangun dialog dengan aktor

---

<sup>5</sup> Ibid., 118.

<sup>6</sup> International Committee of the Red Cross, "ICRC Mandate and Mission," 2020.

<sup>7</sup> François Bugnion, "The Evolution of Humanitarian Diplomacy," *International Review of the Red Cross*, 2012.

<sup>8</sup> Claude Veuthey, "Humanitarian Diplomacy: Saving Lives and Human Dignity," 2012.

<sup>9</sup> World Food Programme, "Humanitarian Principles," 2011.

lokal maupun internasional guna memperkuat perlindungan bagi korban.

### Tingkat Analisis Kelompok

Dalam studi hubungan internasional, tingkat analisis membantu memahami faktor-faktor yang memengaruhi tindakan aktor global. Selain tiga tingkat klasik Kenneth Waltz, individu, negara, dan sistem internasional, penelitian ini menggunakan tingkat analisa kelompok atau organisasi untuk mempelajari peran ICRC dalam konflik Rohingya.<sup>10</sup> Tingkat ini menyoroti bagaimana organisasi internasional beroperasi melalui koordinasi internal, nilai institusional, dan jaringan relasional.

Melalui tingkat analisa kelompok, penelitian ini menyoroti bagaimana ICRC memobilisasi sumber daya, menetapkan prioritas, dan bernegosiasi dengan pemerintah Myanmar serta NGO lokal.<sup>11</sup> Analisis ini memperlihatkan bagaimana kemampuan organisasi internasional dapat berdampak langsung pada akses kemanusiaan, perlindungan sipil, dan penyampaian bantuan. Pendekatan ini relevan karena dinamika konflik Rohingya tidak dapat dijelaskan hanya melalui perilaku negara atau struktur internasional.

Dengan menempatkan ICRC sebagai unit analisis utama, penelitian ini mampu menggambarkan kompleksitas interaksi antara aktor kemanusiaan dan otoritas lokal di tengah pembatasan politik dan militer.<sup>12</sup> Pendekatan ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kontribusi ICRC dalam menjembatani

kesenjangan antara norma hukum humaniter dan praktik di lapangan.

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menggali dan memahami makna, pengalaman, serta perspektif yang mendalam dari fenomena yang terjadi terkait peran ICRC (*International Committee of the Red Cross*) dalam meningkatkan perlindungan kemanusiaan di konflik Rohingya.<sup>13</sup> Analisis deskriptif dilakukan untuk menggambarkan hubungan antara kebijakan, implementasi, dan dampaknya terhadap perlindungan kelompok Rohingya.

Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk menjelaskan bagaimana ICRC menjalankan mandat kemanusiaannya dalam situasi konflik melalui analisis terhadap dokumen, kebijakan, dan laporan yang relevan. Penelitian ini berfokus pada upaya ICRC sesuai dengan prinsip netralitas, kemanusiaan, dan independensi.

Metode ini bertujuan untuk mengungkap fakta dan fenomena yang berkaitan dengan dinamika konflik Rohingya, sehingga dapat memberikan pemahaman menyeluruh mengenai peran dan kontribusi ICRC. Penelitian kualitatif ini berlandaskan pada data sekunder yang diolah dari laporan resmi, jurnal ilmiah, dan artikel daring yang mendukung kajian.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Dinamika Konflik Rohingya dan Dampak Kemanusiaan

<sup>10</sup> Kenneth Waltz, *Man, the State, and War*, (New York: Columbia University Press, 1959).

<sup>11</sup> Mohtar Mas'eed, *Ilmu Hubungan Internasional*, (Yogyakarta: LP3ES, 1994).

<sup>12</sup> ICRC, "Humanitarian Access in Myanmar," 2021.

<sup>13</sup> Mas'ud, M. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES.

Krisis Rohingya di negara bagian Rakhine merupakan salah satu tragedi kemanusiaan paling kompleks di Asia Tenggara. Akar diskriminasi terhadap Rohingya dapat ditelusuri sejak periode kolonial Inggris, ketika terjadi migrasi besar-besaran Muslim dari India Timur ke wilayah Rakhine.<sup>14</sup> Pasca-kemerdekaan Myanmar tahun 1948, muncul narasi bahwa Rohingya adalah pendatang ilegal yang dianggap mengancam identitas nasional berbasis etnis Bamar dan agama Buddha. Diskriminasi tersebut dilembagakan melalui *The Burma Citizenship Law* 1982 yang mengecualikan Rohingya dari daftar etnis resmi Myanmar, sehingga menjadikannya stateless dan kehilangan hak-hak dasar.<sup>15</sup> Keadaan ini menciptakan kondisi sosial yang rentan dan memicu siklus kekerasan yang berulang di Rakhine.

Sampai sebelum terjadinya krisis besar pada 2017, dinamika sosial di Rakhine terus ditandai oleh ketegangan antara komunitas Rohingya dan otoritas negara, yang diperparah oleh kebijakan pembatasan ruang gerak, akses layanan publik yang sangat minim, serta militerisasi wilayah. Kondisi ini membuat Rohingya hidup dalam situasi yang tidak stabil dan rentan terhadap kekerasan, sehingga setiap insiden kecil mudah berkembang menjadi konflik yang lebih luas.

**Gambar: Peta Negara Myanmar**



Sumber: MINA News. (2017). "PBB: Kekerasan Myanmar di Rakhine Bisa Menyebar." Diakses dari <https://minanews.net>.

Ketegangan meningkat drastis pada 25 Agustus 2017 ketika kelompok *Arakan Rohingya Salvation Army* (ARSA) melakukan serangan terhadap beberapa pos keamanan Myanmar.<sup>16</sup> Respons militer yang sangat represif kemudian memicu eksodus massal lebih dari 700.000 Rohingya ke Bangladesh hanya dalam hitungan bulan. Gelombang pengungsian ini menambah jumlah pengungsi Rohingya di Bangladesh menjadi sekitar satu juta orang, sebagian besar tinggal di Kamp Kutupalong di Cox's Bazar, yang kini menjadi kamp pengungsian terbesar di dunia.<sup>17</sup> Laporan Amnesty International dan Human Rights Watch menggambarkan adanya pembunuhan massal, pemerkosaan, pembakaran desa, serta penyiksaan sistematis yang memenuhi kategori kejahatan terhadap kemanusiaan.<sup>18</sup> Situasi tersebut mencerminkan kegagalan

<sup>14</sup> Martin Smith, *Burma: Insurgency and the Politics of Ethnicity* (London: Zed Books, 1991), 56.

<sup>15</sup> The Burma Citizenship Law, 1982.

<sup>16</sup> Amnesty International, "Myanmar: New Evidence of Security Force Violations," 2018.

<sup>17</sup> UNHCR, "Rohingya Refugee Emergency: Bangladesh," 2020.

<sup>18</sup> Human Rights Watch, "All You Can Do is Pray: Crimes Against Humanity in Rakhine State," 2017.

negara dalam memenuhi kewajiban melindungi warga sipil.

Dampak kemanusiaan dari konflik ini sangat luas. Rohingya yang masih berada di Rakhine, diperkirakan sebanyak 300.000-500.000 orang, menghadapi pembatasan mobilitas yang ekstrem, akses kesehatan yang minim, serta pengawasan ketat oleh militer.<sup>19</sup> Di Bangladesh, kepadatan kamp dan keterbatasan infrastruktur menimbulkan risiko tinggi penyakit menular, kekurangan gizi, serta sanitasi buruk.

Krisis ini tidak hanya menjadi isu domestik Myanmar, tetapi juga isu keamanan regional karena menimbulkan arus pengungsi ke negara-negara seperti Bangladesh, Malaysia, Thailand, dan Indonesia. Kondisi ini menunjukkan bahwa konflik Rohingya memiliki implikasi lintas batas yang memerlukan perhatian internasional dan intervensi aktor kemanusiaan seperti *International Committee of the Red Cross* (ICRC).

### **Program dan Implementasi Bantuan ICRC di Rakhine**

Sebagai organisasi kemanusiaan yang netral dan independen, *International Committee of the Red Cross* (ICRC) mulai mendapatkan akses ke wilayah Rakhine pada tahun 1994 setelah melalui negosiasi panjang dengan pemerintah Myanmar.<sup>20</sup> Sejak itu, ICRC berfokus pada pemetaan kebutuhan mendesak masyarakat Rohingya, khususnya dalam aspek kesehatan, sanitasi, dan perlindungan sipil.

Krisis 2017 menjadi titik eskalasi yang mendorong ICRC memperluas

<sup>19</sup> ICRC Myanmar, "Rakhine State Overview," 2021.

<sup>20</sup> ICRC, "Myanmar: ICRC Activities in Rakhine State," 2020.

operasinya secara signifikan, bekerja sama dengan *Myanmar Red Cross Society* (MRCS) untuk menjangkau wilayah-wilayah yang dibatasi ketat oleh militer.<sup>21</sup> Pendekatan ICRC yang berbasis pada prinsip netralitas membuat mereka dapat diterima oleh berbagai aktor, termasuk pemerintah Myanmar yang sensitif terhadap isu kedaulatan.

Program utama ICRC di Rakhine dapat dikategorikan menjadi tiga sektor kunci dari kerangka *Protection and Assistance Programs*, yaitu *Water and Habitat Program*, *Emergency Relief Operations*, dan *Health Assistance*. *Water and Habitat Program* mencakup pembangunan fasilitas air bersih, perbaikan sanitasi, sumur, dan sistem distribusi air, yang menjadi kebutuhan mendasar mengingat banyak desa Rohingya tidak memiliki akses air layak.<sup>22</sup> *Emergency Relief Operations* mencakup distribusi pangan, perlengkapan kebersihan, bahan non-pangan, serta bantuan uang tunai untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga terdampak. Sementara itu, *Health Assistance* berfokus pada penyediaan layanan medis darurat, klinik keliling, rehabilitasi fasilitas kesehatan, serta dukungan terhadap rumah sakit yang menerima pengungsi dan korban kekerasan.<sup>23</sup>

Pelaksanaan program-program tersebut menghadapi tantangan operasional yang signifikan. Akses bantuan sering kali dibatasi oleh otoritas lokal maupun aktor

<sup>21</sup> Myanmar Red Cross Society & ICRC, "Joint Humanitarian Operations Overview," 2018.

<sup>22</sup> ICRC, "Water and Habitat: Responding to Humanitarian Needs in Myanmar," 2019.

<sup>23</sup> ICRC, "Health Assistance for Conflict-Affected Communities in Rakhine," 2021.

bersenjata, sehingga ICRC harus melakukan negosiasi berulang untuk memastikan keselamatan staf dan jalur distribusi.<sup>24</sup> Sensitivitas politik dan meningkatnya ketegangan pasca kudeta militer Myanmar tahun 2021 membuat ruang gerak organisasi kemanusiaan semakin terbatas. ICRC tetap mempertahankan peran pentingnya melalui diplomasi kemanusiaan, pendekatan berbasis komunitas, serta kolaborasi erat dengan MRCS dan aktor lokal lainnya. Pendekatan bertahap dan adaptif ini memungkinkan ICRC untuk tetap memberikan perlindungan serta layanan kemanusiaan yang berkelanjutan bagi Rohingya.

### Analisis Peran ICRC

Peran ICRC dalam konflik Rohingya dapat dipahami melalui perspektif pluralisme yang menempatkan aktor non-negara sebagai bagian penting dari hubungan internasional. Dalam kasus Myanmar, negara gagal memberikan perlindungan dasar kepada Rohingya, sehingga organisasi seperti ICRC menjadi aktor utama yang mengisi kekosongan tersebut.<sup>25</sup> Mandat kemanusiaan ICRC, ditambah karakter netral dan independennya, menjadikannya pihak yang dipercaya untuk memberikan bantuan di wilayah yang penuh diskriminasi dan pembatasan.

Dari sisi *humanitarian diplomacy*, ICRC menjalankan pendekatan diplomatik untuk membuka akses bantuan di Rakhine. Prinsip kemanusiaan, netralitas, dan ketidakberpihakan menjadi dasar operasi mereka dalam bernegosiasi dengan

pemerintah Myanmar dan otoritas militer.<sup>26</sup> Dialog bilateral yang dijalani ICRC, baik di Yangon maupun melalui kantor pusat di Jenewa, memungkinkan mereka memperoleh izin masuk, mengirim bantuan, dan memantau kondisi masyarakat tanpa memicu resistensi politik.

Keberadaan ICRC di lapangan memberikan ruang dialog yang lebih aman antara komunitas lokal dan otoritas terkait. Kehadiran mereka membantu meredam ketegangan, sekaligus memastikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat tetap menjadi prioritas dalam situasi yang penuh ketidakpastian.

Melalui tingkat analisa organisasi, tindakan ICRC dapat dipahami sebagai hasil koordinasi internal dan kerja sama dengan aktor lokal seperti *Myanmar Red Cross Society* (MRCS). Analisis ini melihat ICRC sebagai entitas kolektif yang menetapkan prioritas, memobilisasi sumber daya, dan menyesuaikan strategi berdasarkan kondisi lapangan.<sup>27</sup> Pendekatan ini menjelaskan bagaimana ICRC mampu tetap beroperasi meskipun menghadapi pembatasan akses dan sensitivitas politik.

Peran ICRC terlihat bukan hanya berasal dari bantuan fisik yang diberikan, tetapi juga dari kemampuan mereka menjembatani norma kemanusiaan internasional dengan realitas politik Myanmar. Pluralisme menjelaskan posisinya sebagai aktor non-negara yang penting, *humanitarian diplomacy* menjelaskan bagaimana akses dibuka, dan tingkat

<sup>24</sup> Humanitarian Access Overview, UNOCHA Myanmar, 2022.

<sup>25</sup> Paul Viotti dan Mark Kauppi, *International Relations Theory* (New York: Longman, 2012), 145.

<sup>26</sup> Claude Veuthey, "Humanitarian Diplomacy: Saving Lives and Human Dignity," 2012.

<sup>27</sup> Mohtar Mas'oed, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi* (Yogyakarta: LP3ES, 1994), 156.

organisasi menjelaskan bagaimana operasi tersebut dijalankan secara konsisten.

### Evaluasi Dampak Intervensi ICRC terhadap Perlindungan Kemanusiaan

Intervensi ICRC di Rakhine memberikan dampak nyata terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Rohingya. Program air bersih, bantuan pangan, serta layanan kesehatan darurat membantu mengurangi kerentanan warga yang sebelumnya tidak memiliki akses terhadap kebutuhan minimum untuk bertahan hidup.<sup>28</sup> Meski skala bantuan tidak dapat sepenuhnya mengatasi tingginya tingkat kemiskinan dan keterbatasan infrastruktur, keberadaan ICRC tetap menjadi penyokong utama bagi komunitas yang terisolasi.

Di tingkat perlindungan, ICRC berperan dalam mendorong penghormatan terhadap hukum humaniter internasional melalui dialog dengan pemerintah Myanmar dan otoritas lokal. Pendekatan ini penting untuk menekan praktik kekerasan, pembatasan mobilitas, serta pelanggaran HAM lain yang dialami Rohingya.<sup>29</sup> Walaupun perubahan yang dihasilkan belum signifikan karena resistensi politik dan dominasi militer, diplomasi kemanusiaan ICRC membantu membuka ruang perlindungan yang sebelumnya hampir tidak tersedia.

Dampak jangka panjang intervensi ICRC bergantung pada konsistensi akses dan kerja sama dengan pihak lokal seperti *Myanmar Red Cross Society* (MRCS). Keberhasilan program bantuan sering kali

terhambat oleh pembatasan militer dan kondisi keamanan yang tidak stabil, terutama setelah kudeta 2021.<sup>30</sup> Kendala ini menyebabkan beberapa program tidak dapat diperluas sesuai kebutuhan, namun ICRC tetap mempertahankan keberlanjutan layanan dasar di wilayah yang masih dapat dijangkau.

Kesenjangan antara dasar, kondisi lapangan yang sarat pembatasan, dan dasar, norma perlindungan kemanusiaan menurut hukum humaniter internasional, masih terlihat jelas. Meski begitu, keberadaan ICRC menjadi bukti bahwa aktor non-negara dapat memainkan peran penting dalam menjembatani norma global dengan realitas konflik lokal. Upaya mereka menunjukkan kontribusi yang berarti dalam memperkuat perlindungan kemanusiaan bagi Rohingya, sekaligus menegaskan bahwa akses bantuan tetap bergantung pada ruang diplomasi dan dinamika politik Myanmar.

### SIMPULAN

Krisis Rohingya menunjukkan kegagalan negara dalam memberikan perlindungan dasar kepada warganya, sehingga membuka ruang bagi aktor non-negara seperti *International Committee of the Red Cross* (ICRC) untuk mengambil peran penting dalam penanganan kemanusiaan. Diskriminasi sistematis, pembatasan mobilitas, serta kekerasan yang meluas membuat kebutuhan akan bantuan kemanusiaan menjadi sangat mendesak. ICRC hadir sebagai aktor yang mampu memberikan respons cepat melalui bantuan air bersih, pangan, kesehatan, serta

<sup>28</sup> ICRC, "Rakhine State Operational Update," 2020.

<sup>29</sup> ICRC, "Humanitarian Dialogue and Protection Activities in Myanmar," 2019.

<sup>30</sup> UNOCHA, "Myanmar Humanitarian Needs Overview," 2022.

perlindungan berbasis hukum humaniter internasional.

Melalui pendekatan pluralisme, *humanitarian diplomacy*, dan tingkat analisa organisasi, penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas ICRC bukan hanya berasal dari kapasitas bantuan material, tetapi juga dari kemampuannya menjalin negosiasi, membangun kepercayaan, dan menjaga prinsip netralitas dalam menghadapi otoritas politik dan militer Myanmar. *Humanitarian diplomacy* menjadi aspek kunci yang memungkinkan ICRC memperoleh akses ke wilayah terbatas, sementara koordinasi internal organisasi memastikan program bantuan dapat tetap berjalan meskipun menghadapi berbagai hambatan.

Dampak intervensi ICRC masih dibatasi oleh dinamika politik Myanmar, pembatasan akses, serta risiko keamanan yang meningkat terutama pasca kudeta 2021. Hal ini menciptakan kesenjangan antara das sein dan das sollen. Peran ICRC tetap memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat perlindungan kemanusiaan bagi etnis Rohingya dan menjadi bukti pentingnya aktor non-negara dalam menjembatani nilai-nilai kemanusiaan internasional dengan realitas konflik lokal.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Crouch, M. (2016). *Citizenship and Myanmar's Rohingya: The politics of name and recognition*. Journal of Contemporary Southeast Asia, 38(1), 114-139.
- Mas'oed, M. (1994). *Ilmu hubungan internasional: Disiplin dan metodologi*. LP3ES.

- Smith, M. (1991). *Burma: Insurgency and the politics of ethnicity*. Zed Books.
- Viotti, P. R., & Kauppi, M. V. (2012). *International relations theory*. Longman.
- Waltz, K. N. (1959). *Man, the state, and war*. Columbia University Press.

### Jurnal

- Bugnion, F. (2012). The evolution of humanitarian diplomacy. *International Review of the Red Cross*.
- Crouch, M. (2016). Citizenship and Myanmar's Rohingya: The politics of name and recognition. *Journal of Contemporary Southeast Asia*, 38(1), 114-139.

### Website

- Amnesty International. (2017). *Caged without a roof: Apartheid in Myanmar's Rakhine State*.
- Amnesty International. (2018). *Myanmar: New evidence of security force violations*.
- Human Rights Watch. (2017). *All you can do is pray: Crimes against humanity in Rakhine State*.
- International Committee of the Red Cross. (2019). *Humanitarian dialogue and protection activities in Myanmar*.
- International Committee of the Red Cross. (2019). *Water and habitat: Responding to humanitarian needs in Myanmar*.
- International Committee of the Red Cross. (2020). *ICRC mandate and mission*.
- International Committee of the Red Cross. (2020). *Myanmar: ICRC activities in Rakhine State*.
- International Committee of the Red Cross. (2020). *Rakhine State operational update*.
- International Committee of the Red Cross. (2021). *Health assistance for*

*conflict-affected communities in Rakhine.*

International Committee of the Red Cross. (2021). *Humanitarian access in Myanmar.*

International Committee of the Red Cross. (2021). *Rakhine State overview.*

International Committee of the Red Cross. (2024). *Humanitarian response in Myanmar: Annual report 2024.* ICRC.

MINA News. (2017). *PBB: Kekerasan Myanmar di Rakhine bisa menyebar.*

Myanmar Red Cross Society & International Committee of the Red Cross. (2018). *Joint humanitarian operations overview.*

The Burma Citizenship Law. (1982).

UNHCR. (2020). *Rohingya refugee emergency: Bangladesh.*

UNOCHA Myanmar. (2022). *Humanitarian access overview.*

UNOCHA. (2022). *Myanmar humanitarian needs overview.*

World Food Programme. (2011). *Humanitarian principles.*